

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan. Oleh karena itu, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk Laporan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). LAKIP disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah pada pengelolaan pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari dinas ini adalah melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam program kerja berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 350/KEP/BPP/2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan, pengawasan, dan penendalian penyusunan kebijakan strategis dinas.
 - b. Perumusan kebijakan umum bidang pendidikan dan kebudayaan;

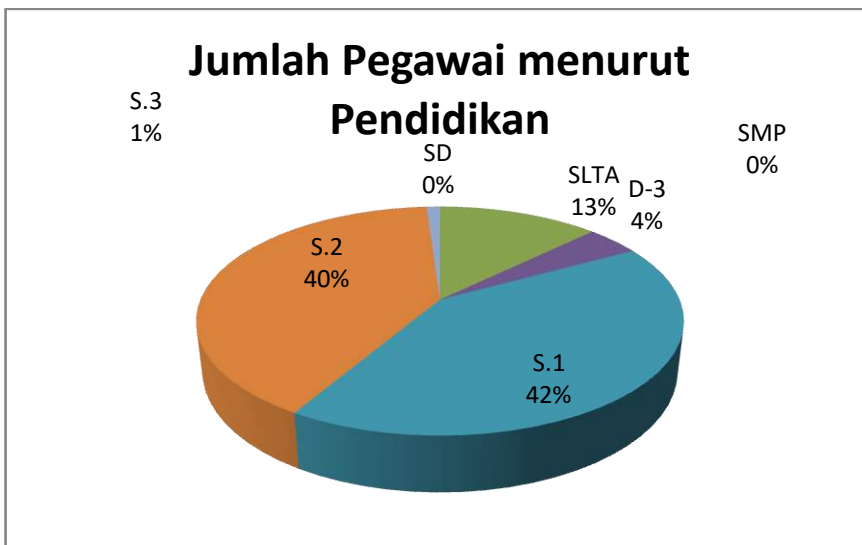
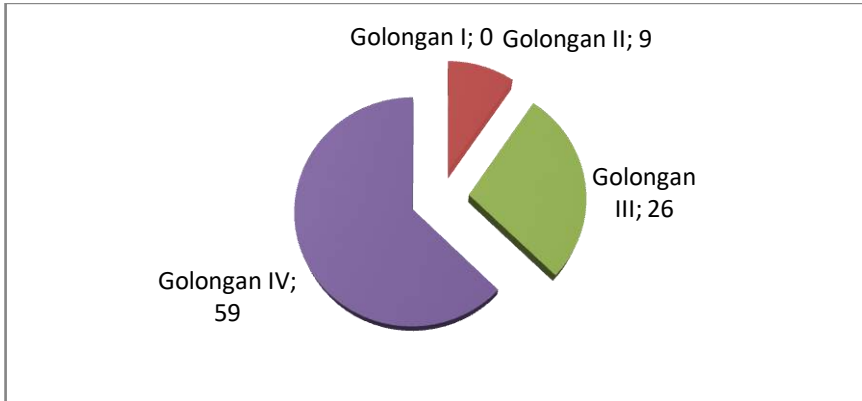
- c. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- d. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pelaksaaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- f. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- h. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan / atau
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ringkasan SKPD Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan dan Susunan Personilnya
 Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

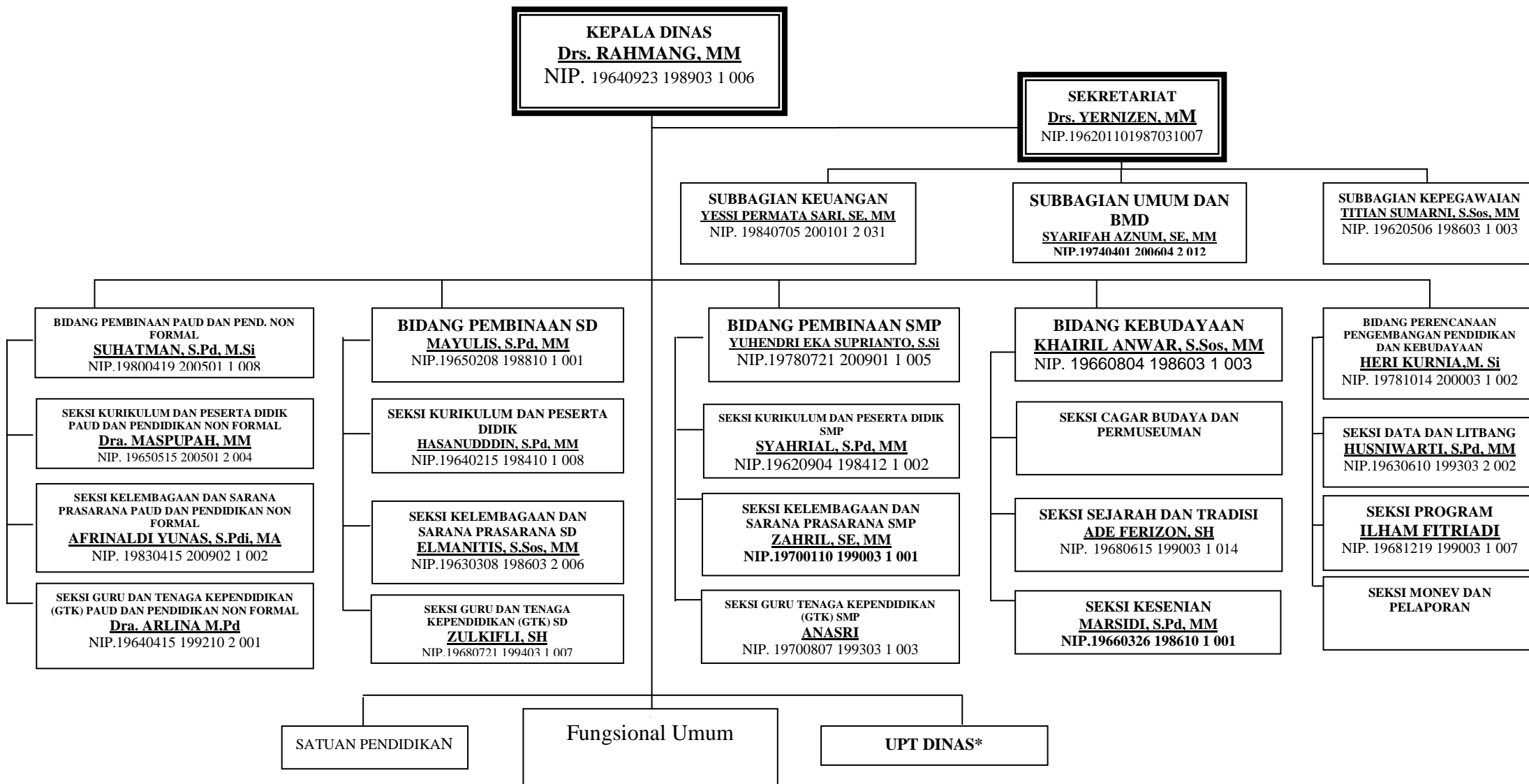
Tabel : Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No	Jumlah Pegawai menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
1	I	0	SD	0	
2	II	9	SMP	0	
3	III	26	SLTA	12	
4	IV	59	D-3	4	
			S.1	39	
			S.2	38	
			S.3	1	
Jumlah		94		94	

Diagram Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Pendidikan



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis diantaranya :

1. Pemerataan Pendidikan

- a. Menambah Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah/Madrasah Baru
- b. Memperbaiki, rehabilitasi dan merevitalisasi fasilitas pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Prasekolah.
- c. Melaksanakan penjangkaran anak usia sekolah baik yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah untuk masuk kedalam sistem pendidikan.
- d. Menyenggarakan pendidikan layanan khusus bagi peserta didik di daerah terpencil dan atau mengalami bencana alam dan bencana sosial
- e. Menyenggarakan pendidikan khusus bagi anak-anak yang memiliki keunggulan dan memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran, khususnya yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau intelektual.
- f. Melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk beasiswa untuk menarik anak usia jenjang pendidikan dasar yang berada diluar sistem sekolah, baik yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah dengan tetap memberi perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender.

2. Peningkatan mutu pendidik

- a. Meningkatkan persentase pendidik yang memenuhi standar kualifikasi
- b. Melakukan rekrutmen guru sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.
- c. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru.
- d. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Manajemen Guru Mata Pelajaran
- e. Memberikan beasiswa Peningkatan Pendidikan bagi guru berprestasi
- f. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja sekolah dan lembaga pendidikan lainnya

3. Peningkatan Mutu Peserta Didik

- a. Menyediakan buku pelajaran pokok dan alat peraga belajar secara memadai
- b. Melanjutkan program beasiswa bagi anak berprestasi
- c. Menyediakan Dana Operasional Sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyediakan Dana Operasional Sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas

-
4. Meningkatkan mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan.
 - a. Melakukan penambahan fasilitas fungsional seperti ruang perpustakaan, ruang olahraga, ruang laboratorium dan pusat sumber belajar yang dilengkapi dengan sarana / peralatan pendukungnya.
 - b. Menyediakan dana Operasional Sekolah untuk mendukung proses Pembelajaran yang berkualitas.
 - c. Memperluas dan memantapkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Masyarakat (MBS) untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Prasekolah

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Menyajikan capaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan .untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

-
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Melalui RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN pada tahun 2017 merupakan tahun Kedua dari periode Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mencapai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2017. Dan menetapkannya dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Target-target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2017

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

A. RENCANA SRATEGIS

1. Visi

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mengacu pada VISI 2016-2021, yaitu :

“ Terwujudnya SDM Yang Cerdas, Berkarakter, Berbudaya dan Berdaya Saing“.

Makna VISI adalah :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dengan meningkatkan pendidikan.
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berbudaya dan berdaya saing dengan pendidikan yang berkualitas yang diiringi nilai budaya.

2. Misi

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- 1) Peningkatan Perluasan Akses Pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.
- 2) Peningkatan Kualitas pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.
- 3) Pengembangan dan Pelestarian seni dan budaya daerah berbasis pada kearifan lokal

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2017

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Perluasan Akses Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Akses Pendidikan (Improving Educational Access)	<ul style="list-style-type: none"> - APK Paud - APM SD/MI - APK SD/MI - APM SMP/MTs - MAPK SMP/MTs - % 1 Korong 1 Paud - Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 	Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar, Paud dan Dikmas	<ul style="list-style-type: none"> - APM SD/MI - APK SD/MI - APM SMP/MTs - APK SMP/MTs - % Korong minimal mempunyai 1 Paud - Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Mutu Pendidik (Improving Quality of Education)	<ul style="list-style-type: none"> - % guru berkualifikasi S1 - % Guru SD Bersertifikasi - %PAUD terakreditasi - %SD Minimal terakreditasi B - %SMP Minimal terakreditasi B - %PKBM yang memiliki sarana prasarana memadai - Angka Putus Sekolah SD/MI - Angka Putus Sekolah SMP/MTs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Peningkatan Mutu Peserta Didik 3. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1 - Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1 - Persentase Guru SD Bersertifikasi - Persentase Guru SMP Bersertifikasi - Jumlah Guru mengikuti Diklat Kepala Sekolah - Angka Kelulusan SD/MI - Angka Kelulusan SMP/MTs - Nilai rata-Rata UN SD - Nilai rata-Rata UN SMP - Nilai Integritas UN SMP - Jumlah siswa SD mendapat Prestasi setingkat Provinsi - Jumlah siswa SMP mendapat Prestasi setingkat Provinsi - Persentase PAUD terakreditasi - Persentase SD Terakreditasi - Persentase SMP Terakreditasi - Persentase PKB Terakreditasi
Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah berbasis pada kearifan local.	Melestarikan Seni dan Budaya (Sustaining Arts and Culture)	<ul style="list-style-type: none"> - % Cagar Budaya yang berkondisi Baik - % Kelompok seni yang dibina 	Peningkatan Kualitas Seni Tradisional, Budaya Daerah, Cagar Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase cagar budaya dengan kondisi Baik - Persentase Kelompok Seni yang dibina

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Padang Pariaman tahun 2017 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 termasuk untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung oleh 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 28 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
01.	Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	45
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	90
		Angka Partisipasi Kasar(APK) SD/MI/Paket A	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	65
		Peningkatan Angka Partisipasi Kasar(APK) SMP/MTs/Paket B	76
		Persentase Korong Minimal 1 PAUD	65
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,1
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,11
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	96
2	Peningkatan Mutu Pendidik	Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1	93
		Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1	93
		Persentase Guru SD /MI bersertifikasi	60
		Persentase Guru SMP bersertifikasi	60
		Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala	300
3	Peningkatan Mutu Peserta Didik	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,96
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,92
		Nilai Rata-rata Ujian SD	80
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Nilai Indeks Integritas UN SMP	75
		Jumlah Siswa SD mendapatkan prestasi minimal setingkat Provinsi	3
		Jumlah Siswa SMP mendapatkan prestasi minimal setingkat Provinsi	3
4	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase PAUD Terakreditasi	22
		Persentase SD Minimal B Terakreditasi	40
		Persentase SMP Minimal B Terakreditasi	56
		Persentase PKBM Terakreditasi	12
5	Meningkatkan Kualitas seni tradisional budaya Daerah, cagar Budaya, Sejarah dan Purbakala	Persentase Cagar Budaya dengan kondisi baik	100
		Persentase Kelompok Seni Tradisional yang dibina	100

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Bupati Padang pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2017. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Capaian Kinerja DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2017, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Target 2017	Realisasi Tahun 2017	%
1	2	3		4		
		INDIKATOR KINERJA UTAMA				
1	Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	22,48	45	39,93	88,72
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	87,83	90	87,71	97,46
		Angka Partisipasi Kasar(APK) SD/MI/Paket A	103,39	100	101,29	101,29
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	58,60	65	56,51	86,94
		Angka Partisipasi Kasar(APK) SMP/MTs/Paket B	83,13	76	74,10	97,51
		Persentase Korong Minimal 1 PAUD	53,8	65	61,72	94,95
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,03	0,1	0,02	20,96
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,08	0,11	0,03	25,44
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	70,85	96	91,84	95,66
2	Peningkatan Mutu Pendidik	Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1	90,88	93	91,36	98,23
		Persentase Guru SMP/MTs	91,22	93	91,37	98,25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Target 2017	Realisasi Tahun 2017	%
1	2	3		4		
		berkualifikasi S1				
		Persentase Guru SD /MI bersertifikasi	45,04	60	46,29	77,14
		Persentase Guru SMP bersertifikasi	56,98	60	58,16	96,94
		Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala	409	300	409	136,33
3	Peningkatan Mutu Peserta Didik	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,95	99,96	99,85	99,88
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,86	99,92	99,92	100%
		Nilai Rata-rata Ujian SD	78,45	80	79,32	99,14
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	46,89	50	47,53	95,06
		Nilai Indeks Integritas UN SMP	65,43	75	74,23	98,97
		Jumlah Siswa SD mendapatkan prestasi minimal setingkat Provinsi	1	3	2	66,67
		Jumlah Siswa SMP mendapatkan prestasi minimal setingkat Provinsi	1	3	0	0
4	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase PAUD Terakreditasi	18,24	22	20,77	94,39
		Persentase SD Minimal B Terakreditasi	42,01	40	44,61	111,52
		Persentase SMP Minimal B Terakreditasi	66,68	56	68,33	122,02
		Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) terakreditasi	0	12	0	0
		Persentase PKBM Terakreditasi	2	12	7	58,33
5	Meningkatkan Kualitas Seni Tradisional Budaya Daerah, Cagar Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan	Persentase Cagar Budaya dengan kondisi baik	95,83	100	95,83	95,83
		Persentase Kelompok Seni Tradisional yang dibina	30,21	100	38,89	38,89

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 :



Dalam rangka Pemerataan Akses Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

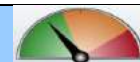
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
3. Angka Partisipasi Kasar(APK) SD/MI/Paket A
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
5. Angka Partisipasi Kasar(APK) SMP/MTs/Paket B
6. Persentase Korong Minimal 1 PAUD
7. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
8. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
9. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	45	39,93	88,72
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	90	87,71	97,46
		Angka Partisipasi Kasar(APK) SD/MI/Paket A	100	101,29	101,29
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	65	56,51	86,94
		Angka Partisipasi Kasar(APK) SMP/MTs/Paket B	76	74,10	97,51
		Persentase Korong Minimal 1 PAUD	65	61,72	94,95
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,1	0,02	20,96
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,11	0,03	25,44
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	96	91,84	95,66

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

1. Angka Partisipasi Kasar PAUD



Menghitung APK PAUD adalah Jumlah seluruh siswa jenjang PAUD (TK/KB/TPA/SPS) dibagi jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun dikali 100%. APK PAUD tahun 2017 adalah 39,93% rendah dari angka yang di targetkan yaitu sebesar 45% dengan Persentase 88,72 %. Tidak tercapainya target yang ditetapkan Partisipasi Kasar dapat disebabkan oleh: (1). Adanya Siswa yang bersekolah keluar kab. Padang Pariaman, (2) tidak semua orang berpendapat bahwa PAUD itu penting (3). Tingginya biaya pendidikan di jenjang PAUD (4). Data terkait siswa PAUD belum valid karena hampir semua PAUD data di dapodiknya selalu berubah-ubah.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A



Cara menghitung APM SD/MI/Paket A adalah Jumlah seluruh siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dikali 100%. Capaian APM SD/MI/Paket A tahun 2017 adalah 87,71% lebih rendah dari angka yang di targetkan yaitu sebesar 90%, pada Partisipasi Murni maupun kasar dapat disebabkan oleh: (1). Adanya Siswa dari Penduduk asli Padang Pariaman yang bersekolah keluar kab. Padang Pariaman (2). Tingginya biaya operasional untuk pendidikan di Kab. Padang Pariaman mengakibatkan beberapa siswa lebih memilih sekolah diluar Kabupaten Padang Pariaman (3) kurangnya aksesibilitas terhadap sekolah yang ada di Kab. Padang Pariaman, (4) masih rendahnya kesadaran bersekolah pada sebagian masyarakat (5). Target awal yang ditetapkan juga terlalu tinggi. Walaupun demikian dengan capaian yang dibawah target dapat dikatakan Angka Partisipasi Murni **Berhasil**.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A



APK SD/MI/Paket A adalah Jumlah seluruh siswa SD/MI/Paket dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dikali 100%. APK SD/MI/Paket A tahun 2017 adalah 101,29 % Tinggi dari angka yang di targetkan yaitu sebesar 100% dengan Persentase 101, 29% tercapainya target yang ditetapkan, Untuk Angka Partisipasi Kasar Kita Melebihi disebabkan oleh (1) Letak Kabupaten Padang Pariaman berada di beberapa daerah Perbatasan yaitu : Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kota padang Panjang, sehingga ada beberapa siswa dari Kab. Tetangga lebih

memilih bersekolah di Kab. Padang Pariaman, (2) masih adanya penduduk Padang Pariaman usia sekolah Dasar yang belum mau Bersekolah Walaupun demikian Angka partisipasi kasar apabila diatas 100 % dapat dikatakan **Sangat berhasil**

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B



Cara menghitung APM SMP/MTS/Paket B adalah Jumlah seluruh siswa SMP/MTS/Paket B yang berusia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun dikali 100%. APM SMP/MTS/Paket B tahun 2017 adalah 56,51% dibawah yang ditargetkan yaitu sebesar 65% dengan Persentase Capaian 86,94% dan dapat dikatakan **berhasil**, Angka Partisipasi murni kita masih sedikit dibawah target disebabkan oleh : (1) banyaknya siswa kita yang pindah dan memilih sekolah ke Luar Kab. Padang Pariaman bahkan ada yang keluar Provinsi Sumatera Barat. (2) letak geografis kita yang berdekatan dengan Kota Pariaman dan Kota Padang sehingga siswa yang berada diperbatasan lebih memilih bersekolah di luar Kab. Padang Pariaman dengan alasan transportasi lebih mudah dan waktu tempuh yang cepat.

5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B



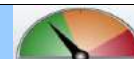
APK SMP/MTS/Paket B adalah Jumlah seluruh siswa SMP/MTS/Paket B dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun dikali 100. APK SMP/MTS/Paket B tahun 2017 adalah 74,1% dimana sudah dibawah angka yang di targetkan yaitu sebesar 76 % dengan Persentase 97,51%, partisipasi kasar sudah diatas angka yang ditargetkan, karena fluktuasi usia anak sekolah di Kabupaten Padang Pariaman cukup tinggi, artinya cukup banyak siswa di jenjang SMP/MI/Paket B yang berusia diatas 15 tahun sehingga secara murni target belum tercapai sementara secara kasar sudah melebihi target, dan sudah dapat kita katakan **sangat berhasil**.

6. Persentase 1 Korong 1 Paud



Persentase Korong Minimal Mempunyai 1 PAUD dengan Rumus Jumlah Korong yang mempunyai PAUD dibagi Jumlah Korong Sekabupaten Padang Pariaman, dengan Capaian Tahun 2017 61,72% dan Target sebesar 65% dengan persentase Capaian 94,95% , hal yang menjadi kendala adalah banyaknya Korong-korong di Kabupaten Padang Pariaman yang tidak Memiliki Akses Jalan yang layak sehingga Penyelenggaraan PAUD hanya terdapat di beberapa Daerah yang bisa dilewati dan mudah diakses.

7. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI



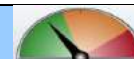
Dalam menghitung Angka Putus Sekolah SD/MI yaitu Jumlah siswa putus sekolah SD/MI dibagi jumlah siswa SD/MI seluruhnya, Angka Putus Sekolah Tahun 2017 dengan Persentase Capaian 20,96 %, Rumus untuk mengetahui Capaian Indikator tersebut adalah Jumlah siswa Putus sekolah di Jenjang SD/MI dibagi Jumlah Siswa SD/MI seluruhnya, Targer Tahun 2017 adalah 0,1 % dengan Capaian 0,02 % berdasarkan Capaian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indikator Capaian APS SD/MI **sangat berhasil**, karena tidak banyaknya siswa kita yang putus sekolah, itu disebabkan oleh (1) banyaknya dukungan dari Pemerintah dan keluarga akan pentingnya Wajib Belajar Sembilan tahun (2) diberikannya beasiswa bagi siswa yang kurang mampu (3) dengan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat terasa manfaatnya bagi siswa-siswa kita tersebut sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak bersekolah.

8. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs



Cara menghitung Angka Putus Sekolah SMP/MTs jumlah siswa putus sekolah SMP/MTs dibagi jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya APS SMP/MTs Target Tahun 2017 0,11% dengan Capaian 0,03% dan Persentase capaian adalah 25,44%, dapat juga dikatakan **sangat berhasil**, disebabkan oleh (1) banyaknya dukungan dari Pemerintah dan keluarga akan pentingnya Wajib Belajar Sembilan tahun (2) diberikannya beasiswa bagi siswa yang kurang mampu (3) dengan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat terasa manfaatnya bagi siswa-siswa kita tersebut sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak bersekolah.

9. Angka Melanjutkan SD/MI ke Jenjang SMP/MTs



Angka Melanjutkan SD/MI ke Jenjang SMP/MTs dihitung dengan rumus Jumlah Siswa Baru tingkat 1 SMP/MTs dibagi jumlah lulusan SD/MI Tahun sebelumnya, Capaian Indikator Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs adalah 91,84% dengan Target 96%, dan persentasenya adalah 95,66%, hal tersebut dapat dikatakan **berhasil**, namun belum memenuhi target karena ada beberapa kendala yaitu Faktor Ekonomi sehingga siswa tersebut tidak mampu lagi melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

Adapun program pendukung dalam sasaran pemerataan Akses pendidikan yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Anggaran 2017
1	Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	41.000.000,00
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Penyediaan Dana Operasional Sekolah TK Pembina Kabupaten	50.000.000,00
		Angka Partisipasi Kasar(APK) SD/MI/Paket A	Penyediaan Dana Operasional Sekolah TK Pembina Kecamatan	45.000.000,00
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jambore PAUD	10.000.000,00
		Angka Partisipasi Kasar(APK) SMP/MTs/Paket B	Jambore PTK PAUDNI	10.000.000,00
		Persentase Korong Minimal 1 PAUD	Forum PAUD	194.675.000,00
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Penyediaan Dana Operasional Sekolah TK/SD Model	75.000.000,00
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Ujian Sekolah (US) SD/MI	48.859.400,00
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP*	24.696.000,00
			Penyelenggaraan Paket C Setara SMA*	24.697.500,00
			Penyediaan Dana Operasional SKB Sungai Limau*	93.600.000,00
			Penyediaan Dana Operasional Rumah Baca Masyarakat*	25.000.000,00
			Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN)	20.000.000,00
			Penyelenggara Ujian Nasional Paket A dan B	14.700.000,00
			Penyelenggara Ujian Nasional Paket C	12.700.000,00
			Penyelenggaraan Paket A Setara SD*	24.700.000,00
			Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) SMP, SMA	11.800.000,00
			Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP, SMA/SMK	22.822.250,00
		Pengembangan Kurikulum	11.000.000,00	
		Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	139.200.000,00	

Gambar 1.1 Acara Jambore PAUD 2017



Sasaran 2:
Peningkatan Mutu Pendidik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2017 dalam upaya Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga pendidik dapat diukur dengan indikator :

1. Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1
2. Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1
3. Persentase Guru SD /MI bersertifikasi
4. Persentase Guru SMP bersertifikasi
5. Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Peningkatan Mutu Pendidik	Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1	93	91,36	98,23
		Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1	93	91,37	98,25
		Persentase Guru SD /MI bersertifikasi	60	46,29	77,14
		Persentase Guru SMP bersertifikasi	60	58,16	96,94
		Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala	300	409	136,33

1. Persentase Guru SD/MI dan SMP/MTs berkualifikasi S1



Adapun Capaian Persentase Guru SD/MI yang berkualifikasi S1 adalah 91.36%, dengan target awal adalah 93 dan Persentase 98,23% sedangkan untuk SMP/MTs capaiannya adalah 91,37% dengan target awal 93% dan Persentase Capaian adalah 98,25% Rumus dalam penghitungan Capaian Indikator ini adalah Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi dibagi Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTs Keseluruhan, hal tersebut dapat dicapai secara mandiri oleh guru yang bersangkutan (dana pribadi) karena dalam hal mendapatkan sertifikasi Guru diwajibkan S1. berdasarkan capaian diatas dapat dikatakan **berhasil**.

2. Persentase Guru SD/MI dan SMP/MTs bersertifikasi Pendidik



Target Capaian Indikator Persentase Guru SD/MI bersertifikasi Pendidik adalah 60% yang tercapai 46,29% dengan Persentase Capaian 77,14% sedangkan untuk SMP/MTs Capaiannya adalah 58,16 dengan Persentase 96,94% dimana target awal adalah 60, hal tersebut sudah bisa dikatakan **berhasil** karena dilihat dari segi Program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kurang Mencukupi untuk PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) sehingga banyak guru-guru kita mengambil langkah Individu atau Mandiri dalam mendapatkan sertifikasi Pendidik.

3. Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala Sekolah



Target Tahun 2017 dalam Jumlah Guru Mengikuti diklat Kepala Sekolah adalah 300 sedangkan Capaian sampai Tahun 2017 ada sebanyak 409 Guru di Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengikuti diklat Kepala Sekolah. Yang diselenggarakan oleh LP2KS Solo Tahun 2016. Dan untuk Tahun 2017 tidak ada program dan Kegiatan yang menjadi tolak Ukur Capaian Indikator Jumlah Guru Mengikuti Kepala sekolah, Namun dalam hal ini sudah bisa dikatakan **Sangat Berhasil** karena dilihat dari capaian yang sudah Melebihi Target awal, Namun tahun berikutnya kita akan berupaya untuk meningkatkan lagi Jumlah Guru yang bersertifikasi Kepala sekolah.

Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Peningkatan Mutu Pendidik adalah :

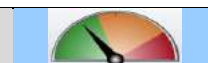
No	kegiatan	Anggaran 2017
1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	26.800.000,00

	Sasaran 3: Peningkatan Mutu Peserta Didik
---	--

1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
3. Nilai Rata-rata Ujian SD
4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP
5. Nilai Indeks Integritas UN SMP
6. Jumlah Siswa SD mendapatkan prestasi minimal setingkat Provinsi
7. Jumlah Siswa SMP mendapatkan prestasi minimal setingkat Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3	Peningkatan Mutu Peserta Didik	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,96	99,85	99,88
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,92	99,92	100%
		Nilai Rata-rata Ujian SD	80	79,32	99,14
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	50	47,53	95,06
		Nilai Indeks Integritas UN SMP	75	74,23	98,97
		Jumlah Siswa SD mendapatkan prestasi minimal setingkat Provinsi	3	2	66,67
		Jumlah Siswa SMP mendapatkan prestasi minimal setingkat Provinsi	3	0	0

1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI



Menghitung Angka Kelulusan SD/MI adalah dengan membandingkan jumlah Angka kelulusan SD/MI tahun dibanding jumlah siswa jenjang tertinggi SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, Angka Kelulusan SD/MI Tahun 2017 dengan target awal adalah 99,96% dan Capaian tahun 2017 adalah 99,85% dan Persentase Capaiannya adalah 99,88%. Namun berdasarkan hal tersebut diatas capaian Untuk angka kelulusan SD/MI **Berhasil**, walaupun persentasenya tidak mencapai 100% dikarenakan adanya

beberapa siswa yang tidak ikut ujian atau yang meninggal atau pindah keluar Kab. Padang Pariaman.

2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs



Menghitung Angka Kelulusan SMP/MTs adalah dengan membandingkan jumlah Angka lulusan SMP/MTs tahun dibanding jumlah siswa jenjang tertinggi SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya Angka Kelulusan SMP/MTs target awal 99,92% dan Capaian 99,92% sehingga Persentasenya menjadi 100%, dapat dikatakan juga bahwa Persentase kelulusan SMP/MTs juga **Sangat Berhasil**.

3. Nilai Rata-rata Ujian SD



Nilai Rata-rata Ujian SD Pertahun adalah 79,32% dengan Target adalah 80% sehingga capaian sangat memuaskan dan **berhasil** yaitu 99,14%

4. Nilai Rata-rata Ujian SMP



sama halnya dengan SMP/MTs Target Tahun 2017 adalah 50% dan Capaian 47,53 %sehingga persentasenya menjadi 95,06% juga dapat dikatakan **Berhasil**.

5. Nilai Indeks Integritas UN SMP



Nilai Integritas UN SMP dapat dilihat dari peran dan Partisipasi Siswa terhadap pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer, tahun 2017 ada beberapa sekolah kita yang mengikuti Ujian berbasis komputer tersebut, dengan target awal 75 dan Capaian 74,23 sehingga persentase capaian menjadi 98,97%, namun untuk Tahun 2018 kita berupaya agar pelaksanaan UNBK ini berlaku untuk seluruh SMP se Kab. Padang Pariaman. Keberhasilan ini disebabkan oleh keikutsertaan beberapa SMP di Kab. Padang Pariaman dalam Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Namun agar capaian maksimal kita masih kekurangan dalam hal pengadaan komputer agar seluruh SMP di Kab. Padang Pariaman dapat melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer agar Indeks Integritas kita semakin membaik dari tahun ke tahun.

Gambar 3.3.1 Pelaksanaan Ujian Berbasis Komputer 2016/2017



6. Jumlah Siswa SD dan SMP mendapatkan prestasi minimal setingkat Provinsi



Jumlah siswa kita yang berperan dalam keikutsertaan dalam berbagai ajang tingkat provinsi sangat banyak namun tidak beberapa yang membawa Prestasi yang baik untuk padang pariaman, kendalanya adalah terbatasnya anggaran kita untuk membawa anak-anak kita untuk lanjut ke tingkat nasional, karena itu disaat anak tersebut berprestasi kita hanya mampu menganggarkan tingkat Kabupaten, Capaian Untuk Tingkat SD adalah 2 dengan target 3 dan persentasenya adalah 66,67% beda

halnya dengan SMP tingkat prestasinya belum ada dengan Capaian 0% dari target awal hanya 3 .tapi untuk SD sudah bisa dikatakan **cukup Berhasil**.

Kegiatan yang menjadi tolak Ukur kesuksesan Capaian Indikator ini adalah :

No	Program/Kegiatan	Anggaran 2017
1	Olimpiade Sain Siswa Nasional (OSSN) Tingkat SD/SMP	41.667.800,00
2	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN)	57.216.500,00
3	Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas Siswa SD	12.254.000,00
4	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD/SMP	59.000.000,00
5	Ujian Sekolah (US) SD/MI	48.859.400,00
6	Penyelenggara Ujian Nasional Paket A dan B	14.700.000,00
7	Penyelenggara Ujian Nasional Paket C	12.700.000,00
8	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) SMP, SMA	11.800.000,00

3.4.1 Gambar Peserta Lomba Baca Puisi SD (FLSSN)



3.4.1 Gambar Peserta Lomba Tari SD (FLSSN)



3.4.1 Gambar Peserta Lomba Pantomin SD (FLSSN)



Sasaran 4:
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

1. Persentase PAUD Terakreditasi
2. Persentase SD Minimal B Terakreditasi
3. Persentase SMP Minimal B Terakreditasi
4. Persentase PKBM Terakreditasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase PAUD Terakreditasi	22	20,77	94,39
		Persentase SD Minimal B Terakreditasi	40	44,61	111,52
		Persentase SMP Minimal B Terakreditasi	56	68,33	122,02
		Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) terakreditasi	12	0	0
		Persentase PKBM Terakreditasi	12	7	58,33

1. Persentase PAUD Terakreditasi



Persentase PAUD Terakreditasi Tahun 2017 adalah 94,39% dengan target 22 PAUD dan realisasi hanya 20,77, Jumlah Paud yang terakreditasi adalah 72 sedangkan jumlah Paud Keseluruhan adalah 366 Lembaga, berdasarkan hal tersebut banyak PAUD yang belum terakreditasi namun pada tahun 2018 ada 113 Paud yang akan melaksanakan Akreditasi. Dalam hal ini seluruh Paud belum terakreditasi disebabkan oleh keterbatasan Anggaran untuk Pengakreditasi sebuah lembaga, dan banyaknya fasilitas belajar dan faktor-faktor pendukung yang belum ada di sebuah PAUD.

2. Persentase SD dan SMP Minimal B Terakreditasi



Target awal dalam Persentase SD Terakreditasi Tahun 2017 adalah 40 dan capaian kita 44,61 sehingga Persentase capaiannya adalah 111,52% hal tersebut di sebabkan karena Jumlah SD yang berakreditasi B adalah sebanyak 128 Satuan Pendidikan dibagi Jumlah SD Keseluruhan yaitu 408 dan capaiannya menjadi 44,61%, hal ini disebabkan oleh keterbatasan biaya dalam pelaksanaan akreditasi sekolah Tahun 2017, dan banyaknya masa Akreditasi sekolah yang akan habis dan perlu visitasi ulang. Hal tersebut tetap kita pertahankan melihat setiap Tahun ada beberapa SD/SMP yang Akreditasinya akan Habis sehingga dilakukan Visitasi Ulang, dalam Penganggaran Untuk Akreditasi kita dibantu oleh Provinsi melalui BAN-SM namun tidak dapat memenuhi apa yang kita inginkan karena keterbatasan Anggaran dari Provinsi, dan kita setiap tahun harus menganggaran agar bisa mengimbangnya dengan Jumlah SD dan SMP yang Akreditasinya akan Habis. Dari Persentase Capaian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Indikator Persentase SD **Sangat Berhasil**.

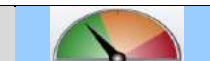
3. Persentase SMP Minimal B Terakreditasi



Sama halnya dengan SMP rumus dalam pencarian capaian SMP terakreditasi adalah jumlah SMP yang berakreditasi B dibagi Jumlah SMP keseluruhan, target awal 56 dan Capaian 68,33 dengan persentase Capaian adalah 122,02%, berdasarkan persentase sudah dapat dikatakan **berhasil**, namun dari segi jumlah SMP di Kab Padang Pariaman keseluruhan masih ada beberapa SMP yang belum terakreditasi, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penunjang syarat untuk sebuah sekolah yang harus diakreditasi belum lengkap dan baik. Sehingga kita harus meningkatkan

pembangunan, rehabilitasi, pengadaan-pengadaan yang dapat menjadi penunjang suatu sekolah agar bisa terakreditasi.

4. Persentase PKBM Terakreditasi



Jumlah PKBM yang terakreditasi sebanyak 7 PKBM dari target 12 Jumlah keseluruhannya. Dengan Capaian Indikator sebesar 58,33%. Dalam hal ini yang menjadi kendala adalah tidak adanya anggaran untuk Pengakreditasi PKBM dan Faktor-faktor pendukung suatu PKBM agar bisa terakreditasi.

Untuk Kegiatan yang menjadi tolak Ukur seluruh Pelaksanaan sasaran ke 4 peningkatan kualitas sarana prasarana Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembangunan gedung kantor	443.000.000,00
2	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	50.000.000,00
3	Pembangunan gedung sekolah	2.290.000.000,00
4	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	1.000.000.000,00
5	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	400.000.000,00
6	Pengadaan mebeluer sekolah	342.125.000,00
7	Kegiatan DAK Pendidikan SD/SDLB	5.777.000.000,00
8	Kegiatan DAK Pendidikan SMP/SMPLB	4.400.000.000,00
9	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	59.951.600,00
10	Pengembangan Kurikulum	11.000.000,00



Sasaran 5: **Meningkatkan Kualitas Seni Tradisional Budaya Daerah, Cagar Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan**

1. Persentase Cagar Budaya dengan kondisi baik
2. Persentase Kelompok Seni Tradisional yang dibina

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5	Meningkatkan Kualitas Seni Tradisional Budaya Daerah, Cagar Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan	Persentase Cagar Budaya dengan kondisi baik	100	95,83	95,83
		Persentase Kelompok Seni Tradisional yang dibina	100	38,89	38,89

1. Persentase Cagar Budaya dengan kondisi baik

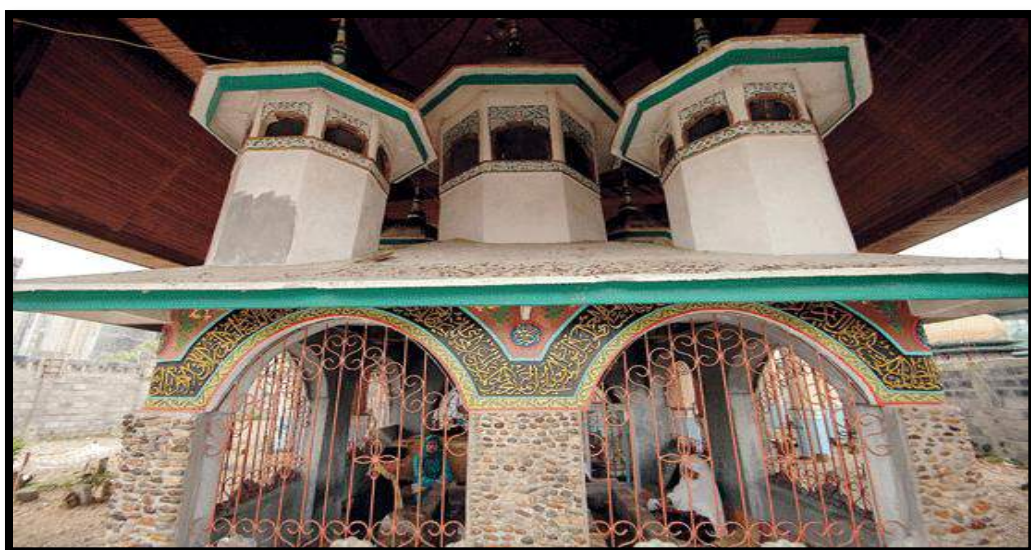


Persentase cagar budaya dengan kondisi Baik capaiannya adalah 95,83% sementara target awal adalah 100% sehingga persentase capaian sebesar 95,83. Dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Padang Pariaman Jumlah Cagar Budaya ada sebanyak 24 Buah dimana yang mempunyai kondisi baik hanya 23 buah, sedangkan satu diantaranya tersebut sudah hancur dan rata dengan tanah akibat gempa 2009. Namun cagar Budaya lainnya harus ada pemeliharaan agar cagar budaya tersebut tidak hilang oleh zaman.

Gambar 5.1.1 Revitalisasi cagar Budaya Tak Wujud



Gambar 5.1.2 Makam Syek Burhanuridin Ulakan



2. Persentase Kelompok Seni Tradisional yang dibina



Target Tahun 2017 Persentase Kelompok Seni Tradisional yang dibina adalah 100% dari 47 sanggar, sementara yang dibina hanya 38,89% (7 kelompok). Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan dana pembinaan seni tradisional bersumber dari APBD Padang Pariaman untuk pengadaan peralatan Kesenian itu sendiri.

5.2.1 Kelompok Seni Padang Pariaman



5.2.2 Kelompok Gandang Tasa Padang Pariaman (Pelajar)



B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya terbatas pada APBD Kab. Padang Pariaman saja, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017

Tabel 3.47. Realisasi anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
I	Program Pelayanan Administrasi Masyarakat	1.607.166.926,00	1.575.311.454,00	98,02	31.855.472,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	58.000.000,00	57.971.000,00	99,95	29.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000,00	29.182.105,00	81,06	6.817.895,00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	650.700.000,00	634.632.000,00	97,53	16.068.000,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
6	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	19.987.000,00	99,94	13.000,00
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	181.866.926,00	181.739.349,00	99,93	127.577,00
8	Penyedia Jasa Pendukung Adm. Perkantoran	615.600.000,00	606.800.000,00	98,57	8.800.000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	611.700.000,00	610.490.000,00	99,80	1.210.000,00
9	Pembangunan gedung kantor	443.000.000,00	442.270.000,00	99,84	730.000,00
10	Pengadaan Peralatan Kerja	78.750.000,00	78.285.000,00	99,41	465.000,00
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.950.000,00	19.940.000,00	99,95	10.000,00
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	49.999.000,00	100,00	1.000,00
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	19.996.000,00	99,98	4.000,00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.000.000,00	40.813.000,00	99,54	187.000,00
14	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	41.000.000,00	40.813.000,00	99,54	187.000,00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	70.466.500,00	70.132.283,00	99,53	334.217,00
15	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	70.466.500,00	70.132.283,00	99,53	334.217,00
V	Program Pendidikan Anak usia Dini	1.225.075.000,00	1.120.337.776,00	91,45	104.737.224,00
16	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
17	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	41.000.000,00	40.700.000,00	99,27	300.000,00
18	Penyediaan Dana Operasional Sekolah TK Pembina Kabupaten	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
19	Penyediaan Dana Operasional Sekolah TK Pembina Kecamatan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
20	Jambore PAUD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
21	Jambore PTK PAUDNI	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
22	Forum PAUD	194.675.000,00	186.246.600,00	95,67	8.428.400,00
23	Penyediaan Insentif Guru Honorer Jenjang TK	720.000.000,00	675.000.000,00	93,75	45.000.000,00
24	BOP PAUD (DAK non Fisik)	89.400.000,00	88.436.176,00	98,92	963.824,00
25	Penunjang BOP PAUD	15.000.000,00	14.955.000,00	99,70	45.000,00
VI	program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	24.720.583.250,00	24.277.121.539,00	98,21	443.461.711,00

26	Pembangunan gedung sekolah	2.290.000.000,00	2.284.991.000,00	99,78	5.009.000,00
27	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	1.000.000.000,00	997.289.000,00	99,73	2.711.000,00
28	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	400.000.000,00	398.497.800,00	99,62	1.502.200,00
29	Pengadaan mebeluer sekolah	342.125.000,00	338.858.700,00	99,05	3.266.300,00
30	Penyediaan Dana Operasional Sekolah TK/SD Model	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
31	Penyediaan Dana Operasional dan Pembinaan Manajemen BOS Tingkat Kabupaten	38.100.000,00	33.503.500,00	87,94	4.596.500,00
32					
33	Olimpiade Sain Siswa Nasional (OSSN) Tingkat SD/SMP	41.667.800,00	41.667.800,00	100,00	0,00
34	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN)	57.216.500,00	57.216.500,00	100,00	0,00
35	Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas Siswa SD	12.254.000,00	12.254.000,00	100,00	0,00
36	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD/SMP	59.000.000,00	56.990.575,00	96,59	2.009.425,00
37	Penyediaan Insentif Guru Honorer Jenjang Pendidikan Dasar	7.980.000.000,00	7.977.000.000,00	99,96	3.000.000,00
38	Ujian Sekolah (US) SD/MI	48.859.400,00	48.859.400,00	100,00	0,00
39	Kegiatan DAK Pendidikan SD/SDLB	5.777.000.000,00	5.378.566.000,00	93,10	398.434.000,00
40	Kegiatan DAK Pendidikan SMP/SMPLB	4.400.000.000,00	4.399.999.998,00	100,00	2,00
41	Penyediaan honorarium bagi pesuruh sekolah dan petugas sekolah	2.070.000.000,00	2.050.875.000,00	99,08	19.125.000,00
42	Administrasi DAK SD/SDLB dan SLTP	129.360.550,00	125.552.266,00	97,06	3.808.284,00
43	Operasional Sekolah Unggul Terpadu	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Program Pendidikan Non Formal	240.093.500,00	234.592.663,00	97,71	5.500.837,00
44	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP*	24.696.000,00	24.696.000,00	100,00	0,00
45	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA*	24.697.500,00	24.697.500,00	100,00	0,00
46	Penyediaan Dana Operasional SKB Sungai Limau*	93.600.000,00	88.148.713,00	94,18	5.451.287,00
47	Penyediaan Dana Opeasional Rumah Baca Masyarakat*	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
48	Hari Aksara Internasional (HAI)	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Penyelenggaran Hari Anak Nasional (HAN)	20.000.000,00	19.999.900,00	100,00	100,00
50	Penyelenggara Ujian Nasional Paket A dan B	14.700.000,00	14.665.000,00	99,76	35.000,00
51	Penyelenggara Ujian Nasional Paket C	12.700.000,00	12.685.550,00	99,89	14.450,00
52	Gebyar Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Insentif Guru SLB (Non PNS)	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Penyelenggaraan Paket A Setara SD*	24.700.000,00	24.700.000,00	100,00	0,00
VIII	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.019.547.600,00	2.951.059.350,00	97,73	68.488.250,00
55	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	26.800.000,00	20.624.850,00	76,96	6.175.150,00
56	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000,00	49.905.900,00	99,81	94.100,00
57	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) SMP, SMA, SMA	11.800.000,00	11.430.000,00	96,86	370.000,00
58	Seleksi Guru dan Pengawas Berprestasi	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	59.951.600,00	59.602.600,00	99,42	349.000,00
60	Penyelenggaraan Hari Pendidkan Nasional	14.996.000,00	14.996.000,00	100,00	0,00
61	Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Penyediaan Insentif Operator Sekolah	2.856.000.000,00	2.794.500.000,00	97,85	61.500.000,00
IX	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	128.705.324,00	128.200.050,00	99,61	505.274,00
63	Penetapan Angka Kredit Guru	37.000.000,00	36.948.700,00	99,86	51.300,00
64	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP, SMA/SMK	22.822.250,00	22.822.250,00	100,00	0,00
65	Operasional Pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	33.133.074,00	32.819.100,00	99,05	313.974,00

66	Pengembangan Kurikulum	11.000.000,00	10.860.000,00	98,73	140.000,00
67	Pembuatan Website Dinas Pendidikan	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00	0,00
X	program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun				
68	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	18.400.000,00	96,84	600.000,00
69	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00
70	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	12.000.000,00	63,16	7.000.000,00
71	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00
72	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00
73	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	17.200.000,00	90,53	1.800.000,00
74	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	18.860.000,00	99,26	140.000,00
75	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	18.325.875,00	96,45	674.125,00
76	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00
77	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	18.730.260,00	98,58	269.740,00
78	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	12.000.000,00	63,16	7.000.000,00
79	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00
80	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	18.980.000,00	99,89	20.000,00
81	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	18.400.000,00	96,84	600.000,00
82	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	18.994.000,00	99,97	6.000,00
83	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00
84	Penyediaan Dana Operasional UPTD	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00
85	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.534.100,00	99,43	65.900,00
86	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.381.300,00	98,11	218.700,00
87	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.599.900,00	100,00	100,00
88	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.478.700,00	98,95	121.300,00
89	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.309.800,00	97,50	290.200,00
90	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.176.500,00	96,35	423.500,00
91	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.399.500,00	98,27	200.500,00
92	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.304.600,00	97,45	295.400,00
93	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	0,00
94	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.599.900,00	100,00	100,00
95	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	0,00
96	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	0,00
97	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	146.000.000,00	138.215.800,00	94,67	7.784.200,00
99	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	80.000.000,00	79.505.859,00	99,38	494.141,00
100					
101	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	35.000.000,00	34.497.300,00	98,56	502.700,00
102	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	93.070.657.328,00	31.702.751.509,00	34,06	61.367.905.819,00

A. Simpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 adalah :

1. Meningkatnya APK PAUD.
2. Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs.
3. Meningkatnya nilai integritas UN SMP dikarenakan berpartisipasi Kab. Padang Pariaman dalam hal pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun 2017.
4. Meningkatnya nilai rata-rata UN SD dan SMP Tahun 2017.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2017 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2017 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah:

- 1) Penyediaan Dana Operasional TK Pembina Kecamatan dan TK Pembina Kabupaten, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Bidang PAUD dan Pendidikan Non formal yang akan menarik minat siswa maupun orang tua murid agar anak usia 4-6 Tahun mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) Serta tetap melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA agar dapat meningkatkan APK SD maupun SMP. Serta dapat mengurangi angka putus sekolah.

-
- 3) Tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan Anggaran untuk Pengadaan Perangkat Komputer agar seluruh satuan pendidikan jenjang SMP di Kab. Padang Pariaman dapat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer. Yang dapat meningkatkan Indeks Integritas Ujian SMP.
 - 4) Dari segi hal Jumlah siswa SD/SMP yang mendapat prestasi tingkat provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap menganggarkan kegiatan yang bersifat Nasional berupa olimpiade-olimpiade maupun festival. Yang nantinya akan membawa nama Kab. Padang Pariaman di tingkat Provinsi maupun tingkat nasional.
 - 5) Tahun 2018 dalam meningkatkan persentase satuan pendidikan terakreditasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meanggarkan beberapa Kegiatan yaitu pembangunan gedung sekolah, Pengadaan alat praktik peraga siswa, pembangunan sarana air bersih dan sanitary serta pengadaan meubelair sekolah, selain itu kita juga dibantu oleh dana DAK 2018 baik di sanggar kegiatan belajar (SKB), SD maupun di SMP.
 - 6) Untuk meningkatkan kualitas seni tradisional budaya daerah, cagar budaya dan kepurbakalaan tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan perlombaan pidato adat, pelatihan seni anak sekolah, fasilitasi bundo kanduang, pemeliharaan benda dan bangunan situs cagar budaya, pembuatan laga-laga medan nan bapaneh, pembinaan kesenian tradisional, pendataan nilai sejarah dan tradisi, bimbingan teknis sejarah dan tradisi dan fasilitasi pembinaan sanggar.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Parit Malintang, 02 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman



Drs. RAHMANG, MM
NIP. 19640923 198903 1 006